

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era modern ini penyelenggaraan pemerintah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini antaranya ditunjukkan dengan adanya perhatian yang lebih besar terhadap pelayanan penilaian praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi financial atas kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah diartikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005).

Satuan kerja pada instansi merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban pemerintah melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aktivitas tersebut meliputi pencatatan atas pendapatan belanja, asset, dan selain kas. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, salah satu faktor terpenting di dalam suatu pemerintah daerah adalah faktor belanja daerah. Hal ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis pengeluaran,

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2016 terdapat pengelompokan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung . Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Dalam hal ini, belanja tidak langsung di mana penganggarnya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah. Belanja daerah di pergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban dana dan dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen. Karena belanja daerah terkait dengan belanja tidak langsung pembiayaan terhadap belanja daerah di pergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah agar tidak terjadi pemborosan, penyelewengan dan institusi yang selalu merugikan diharapkan pelaksanaan dalam anggaran belanja daerah harus sesuai konsep untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Sistem Akuntansi Pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang menerapkan Sistem Akuntansi berbasis Akrua (*Accrual Basis*) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Sistem Akuntansi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang”**.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam Penulisan laporan ini banyak sekali hal yang dapat di uraikan, namun tentunya perlu adanya pembatasan masalah yaitu dengan penentuan ruang lingkup penulisan. Setiap bahasan akan lebih mudah di mengerti dan di pahami oleh para pembaca serta tidak menyimpang dari obyek.

Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini meliputi :

1. Pengertian sistem akuntansi belanja tidak langsung dan sistem akuntansi yang digunakan pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.
2. Pengertian dan klasifikasi belanja tidak langsung.
3. Fungsi-fungsi organisasi yang terkait.
4. Dokumen yang digunakan pada sistem belanja tidak langsung.
5. Catatan akuntansi yang digunakan
6. Bagan alir dokumen / flowchart system belanja tidak langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah :

1. Mengetahui apakah sistem akuntansi belanja tidak langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik.
2. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan pelaksanaan sistem akuntansi belanja tidak langsung.
3. Membandingkan antara teori yang didapat selama dibangku kuliah dengan praktek di lapangan tentang sistem akuntansi belanja tidak langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

1.3.2 Manfaat penulisan

Manfaat penulisan ini adalah :

a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu sehingga penulis mendapatkan gambaran nyata dari teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

b. Bagi Perusahaan / Instansi

Dapat dijadikan masukan dalam dalam usaha perbaikan kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

c. Bagi pihak lain

Sebagai bahan masukan bagi penulis lain untuk mengadakan penelitian pada penulisan yang akan datang.

1.4 Metode Penulisan Laporan

Penulisan ilmiah memerlukan teknik yang menjamin baik buruknya hasil penulisan. Oleh karena itu, dalam penyusunan tugas akhir ini digunakan metode penulisan eksposisi dan deskriptif. Metode eksposisi adalah tulisan yang menyajikan analisa mengenai suatu obyek dengan mengutamakan penalaran dan maksudnya agar pembaca mendapat pengetahuan baru secara benar (Yudiono Ks, 1984:12). Dalam hal ini penulis memberikan penjelasan atau informasi dalam sebuah proses pelaksanaan belnja tidak langsung pada bagian keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Metode Observasi

Observasi bisasa diartikan sebagai pengamatan langsung kepada suatu obyek yang diteliti (Gorrys Keraf, 2001:161).

Metode ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati kegiatan penyusunan dan pelaksanaan APBD khususnya pada Belanja Tidak Langsung yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perbendaharaan.

b. Metode Wawancara

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan

atau otoritas yaitu seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah (Gorrys Keraf, 2011:161)”.

Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap para pegawai Bagian Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bersangkutan, khususnya pada Sub Bagian Perbendaharaan.

c. Metode Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori dan perbandingan di laporan (Gorrys Keraf, 2001:163).

Dalam hal ini penulis membaca dan mencatat dari buku-buku dan arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan dalam Tugas Akhir ini.

1.4.2 Jenis Data

1. Data Menurut Jenisnya:

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah kumpulan angka-angka observasi atau pengukuran (Suranto dan Lincolin Arsyad, 2003:69).

Data kuantitatif yang diambil dari berupa data transaksi-transaksi pada laporan keuangan tahun 2015.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang dicatat bukan dengan angka tetapi dengan menggunakan klasifikasi-klasifikasi (Suratno dan Lincolin Arsyad, 2003:70).

Data kualitatif yang diambil berupa keterangan-keterangan sejarah berdirinya, dan struktur organisasi perusahaan.

2. Data Menurut sumbernya:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan (Anto Dajan, 19886:19)

Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara dengan para pegawai yang bersangkutan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya (Anto Dajan, 1986:19).

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis memperoleh data sekunder dari buku Pedoman Operasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman bagi setiap pembaca terhadap isi laporan sehingga tercipta suatu pemikiran dan gambaran obyek praktik yang lebih jelas maka diperlukan suatu sistematika penulisan laporan.

Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Manfaat dan Kegunaan Penulisan, dan Cara Pengumpulan data serta Sistematika Penulisan.

BAB II DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Pada bab ini, diuraikan mengenai sejarah singkat, visi, misi, tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan, struktur organisasi dan tugas serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Tinjauan teori dan praktik sistem belanja tidak langsung pada bagian keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Dalam bab ini akan diuraikan tentang praktik yang terjadi di lapangan yang di dukung oleh teori-teori sumber.

BAB IV PENUTUP

Setelah hasil penelitian dikembangkan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya.